

111

## Mengukur Keberhasilan Pembangunan Transmigrasi di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Pesisir Selatan)

.. Herwini Wahyu Susanti

*Transmigrasi bertujuan mengatasi masalah ketidakmerataan pembangunan fisik dan sumber daya manusia antardaerah. Sebagai program yang menyerap anggaran sangat besar, evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Program Transmigrasi menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan menyusun suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan penyelenggaraan Program Transmigrasi di Indonesia. Instrumen dimaksud berupa Indeks komposit dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dinamakan Indeks Keberhasilan Transmigrasi (IKT). Melalui representasi dari indikator-indikator pembangun indeks komposit tersebut, pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan di daerah transmigrasi dapat dilakukan. Penelitian ini mengambil kasus Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penghitungan IKT Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,49 menjelaskan bahwa pembangunan transmigrasi di Kabupaten ini cukup berhasil. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah UPT yang dibangun di Kabupaten ini telah berkembang menjadi desa serta berkontribusi nyata pada pembangunan daerah dan memberikan kehidupan yang lebih sejahtera bagi penduduknya. Namun begitu, kondisi sejumlah UPT lainnya masih jauh tertinggal dengan tingkat kesejahteraan penduduknya yang masih sangat rendah.*

*Kata kunci: transmigrasi, AHP, indeks keberhasilan transmigrasi*

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA

Salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini adalah ketimpangan pemba-

ngunan antardaerah, baik dalam hal pembangunan fisik maupun sumber daya manusia. Ketimpangan ini terjadi sebagai

akibat dari ketidakmerataan jumlah penduduk antardaerah. Populasi terbesar penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar.

Salah satu pemecahan yang pernah ditempuh oleh Pemerintahan Kolonial Belanda yang berkuasa pada saat itu adalah dengan memindahkan penduduk dari daerah berpenduduk padat ke daerah berpenduduk jarang. Mereka menamakan program pemindahan penduduk tersebut dengan sebutan "kolonisasi". Keputusan untuk melaksanakan Program Kolonisasi diambil setelah melihat kenyataan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa pada masa itu cukup tinggi yaitu sekitar 3,9 persen<sup>1</sup>. Hal ini tentu saja membawa dampak pada timbulnya permasalahan penyediaan lapangan kerja untuk menjamin tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Sejak awal kemerdekaan sebutan kolonisasi diubah menjadi transmigrasi.

Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik melalui Undang Undang (UU) No.22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan telah diperbarui menjadi UU No.33 Tahun 2004, penyelenggaraan Program Transmigrasi telah mengalami perubahan mengikuti paradigma yang berkembang saat ini. Pencapaian tujuan pembangunan transmigrasi yang diharapkan saat ini adalah (1) adanya peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar; (2) terjadi-

nya peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah; (3) menjadi sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Keberhasilan pembangunan transmigrasi bisa dinilai berdasarkan tingkat pencapaian ketiga tujuan pembangunan transmigrasi tersebut (Yudohusodo 2004).

Penilaian terhadap keberhasilan pembangunan transmigrasi selama ini lebih ditekankan pada pembangunan fisik oleh Pemerintah di kawasan transmigrasi misalnya prasarana jalan, jembatan, listrik dan air bersih. Sulit untuk mengatakan hal tersebut sebagai suatu keberhasilan karena belum ada ketentuan mengenai indikator-indikator yang bisa digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan transmigrasi. Oleh karena itu, keberadaan instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi menjadi sangat dibutuhkan.

Selama ini evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan transmigrasi hanya dilakukan pada Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih berstatus pembinaan atau disebut UPT Bina. Secara umum, batas waktu pembinaan yang dilakukan terhadap UPT adalah lima tahun. Setelah batas waktu tersebut, transmigran diharapkan sudah bisa mandiri. Selanjutnya, UPT diserahkan kepada pemerintah daerah setempat dan dinamakan UPT Serah.

Menurut Desbarats dalam Saleh (2005), kebijakan redistribusi penduduk seperti penyelenggaraan transmigrasi memerlukan jangka waktu yang cukup

<sup>1</sup> Sejarah lebih lengkap mengenai Kolonisasi bisa dibaca pada buku "Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang", oleh SIswoyo Yudohusodo, Depnakertrans, 2004.

lama yaitu 20 tahun. Waktu yang cukup lama tersebut akan menjadi bersifat *counter productive* terhadap pencapaian hasil apabila penyelenggaraan transmigrasi dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan jangka pendek. Periode pembangunan lima tahun sebagai program jangka pendek kurang tepat untuk mengukur keberhasilan kebijakan redistribusi penduduk.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun instrumen pengukur kinerja dan keberhasilan pembangunan transmigrasi, baik pada UPT Bina maupun UPT Serah. Instrumen dimaksud berupa indikator-indikator yang dapat merepresentasikan pencapaian tujuan pembangunan transmigrasi, yang selanjutnya disebut Indeks Keberhasilan Transmigrasi (IKT). Indeks ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan analisis kinerja penyelenggaraan transmigrasi. Hasil evaluasi dan analisis diharapkan dapat digunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan perencanaan pembangunan transmigrasi di masa mendatang. Metode yang digunakan untuk menyusun IKT adalah model *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Untuk melihat kemampuan IKT dalam merepresentasikan tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi, akan dilakukan uji coba penggunaan indeks ini untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

## PROGRAM TRANSMIGRASI DI KABUPATEN PESIR SELATAN

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan daerah penerima transmigran. Sebagian besar pemukiman transmigrasi di Kabupaten ini dibangun di wilayah selatan terutama di Kecamatan Lunang Silaut. Pemilihan wilayah selatan sebagai wilayah transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan dilatarbelakangi oleh alasan-alasan berikut<sup>2</sup>:

- a. Dalam rangka keseimbangan pembangunan antara wilayah utara (meliputi Kecamatan Ranah Pesisir, Lenggayang, Sutera, Batang Kapas, IV Jurai, Bayang dan Koto 11 Terusan) dan wilayah selatan (meliputi Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut) karena sebelumnya wilayah utara lebih maju dibandingkan wilayah selatan. Di samping itu, juga untuk mengurangi kecemburuan sosial antara penduduk di kedua wilayah tersebut;
- b. Dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya alam terutama lahan gambut yang ada di Kecamatan Lunang Silaut;
- c. Dalam rangka pembukaan jalan baru lintas barat dari Padang menuju Bengkulu;
- d. Pemanfaatan Program PU-Rawa (melakukan pengeringan rawa/membuat drainase) dalam rangka pemanfaatan sumber daya lahan gambut melalui Program Transmigrasi. Pada saat itu

<sup>2</sup> Lembaran Informasi Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2005

Dinas Pekerjaan Umum setempat sedang melaksanakan proyek pembangunan drainase dengan melakukan pengeringan rawa. Ketentuan yang diharuskan untuk menunjang pembangunan drainase tersebut adalah dibangunnya permukiman transmigrasi di daerah tersebut;

- f. Dalam rangka mengamankan daerah perbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
- g. Karena keterbatasan pemerintah kabupaten dalam membiayai pembangunan melalui dana APBD.

#### Gambaran Umum

Program Transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pertama kali pada tahun 1973 dengan menempatkan sebanyak 1.244 jiwa dari 300 kepala keluarga (KK). Pada tahun 1974 ditempatkan lagi sebanyak 300 KK atau sebanyak 1.177 jiwa transmigran yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di lokasi Lunang I Kecamatan Lunang Silaut. Program Transmigrasi selanjutnya berlangsung beberapa tahap dan terus berlangsung sampai sekarang, terutama di Unit Permukiman Transmigrasi yang masih dibina (UPT Bina).

Jenis transmigrasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Setempat (TS), Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial (TSBD atau Transbangdep) dan transmigrasi berkaitan dengan Peningkatan Program Permukiman Perambah Hutan melalui Dana Reboisasi (P4HDR). Pola usaha yang dikembangkan di daerah transmigrasi terdiri dari Pola Tanaman Pangan Lahan Kering

(TPLK) dan Pola Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB).

Transmigran yang ditempatkan di lokasi transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari transmigran dari daerah asal (TPA) dan transmigran dari daerah setempat (TPS). Keterlibatan penduduk setempat sebagai transmigran adalah dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan agar terjadi pengalihan pengetahuan (*transfer of knowledge*) antara TPA dan TPS. Mulai tahun 1997 terjadi pergeseran komposisi transmigran secara signifikan. Jika sebelum tahun 1997 sebagian besar transmigran berasal dari luar daerah (TPA), maka sejak tahun 1997 proporsi transmigran dari daerah setempat (TPS) menjadi lebih banyak dari TPA sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Sampai saat ini UPT yang sudah dibangun di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 13 buah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 UPT telah menjadi UPT Serah karena tugas pembinaan terhadap UPT tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pembinaan terhadap 2 UPT lainnya yaitu UPT Kumbang dan UPT Silaut VI masih merupakan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dari 13 UPT tersebut, 11 buah di antaranya terletak di Kecamatan Lunang Silaut dan 9 di antaranya sudah menjadi UPT Serah (lihat Tabel 2).

Dari hasil wawancara dengan para transmigran di sejumlah lokasi transmigrasi yaitu Lunang II, Silaut I, Silaut II, Silaut IV, Sindang dan Inderapura diketahui bahwa sebelum mengikuti program transmigrasi sebagian besar transmigran tidak mempunyai lahan di daerah asalnya.

Tabel 1  
Jumlah Penempatan Transmigran di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Daerah Asal

No.	LOKASI	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH PENEMPATAN		DAERAH PROVINSI ASAL											
			KK	JIWA	JAWA BARAT		JAWA TENGAH		JAWA TIMUR		DI. YOGYAKARTA		APPDT / TPS			
					KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA
1	Lunang I	1973/1974	300	1,344	-	-	150	772	-	-	-	-	150	572	-	-
2	Lunang II	1974/1975	300	1,177	-	-	247	954	-	-	-	-	53	223	-	-
3	Lunang III	1981/1982	500	2,119	91	347	225	995	130	540	-	-	-	-	54	237
4	Silaut I	1982/1983	500	2,090	150	615	98	411	152	591	-	-	50	176	50	297
5	Silaut II	1985/1986	200	725	30	122	50	166	-	-	-	-	100	341	20	96
6	Silaut III	1986/1987	374	1,482	66	274	83	317	25	98	-	-	125	441	75	352
7	Silaut IV	1986/1987	26	102	10	42	3	11	-	-	-	-	12	44	1	5
8	Silaut V	1987/1988	350	1,235	30	137	37	121	100	412	-	-	118	362	65	203
9	Tanjung Gadang	1990/1991	300	1,168	85	302	44	174	134	507	-	-	-	-	37	185
10	Inderapura	1991/1992	200	884	-	-	50	199	50	176	-	-	-	-	100	509
11	Sindang	1991/1992	300	1,233	100	359	90	396	-	-	-	-	50	175	60	303
12	Silaut VI	1994/1995	300	1,087	70	242	69	251	101	310	-	-	-	-	60	284
13	Kumbang	1994/1995	162	590	50	200	56	202	56	188	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah	1994/1995	450	1,958	50	198	50	177	54	167	-	-	46	145	250	1,271
15		1996/1997	250	1,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	1,294
16		2000	69	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	269
17		2001	200	829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	829
18		2001	150	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	589
19	Jumlah		4,931	20,175	732	2,838	1,252	5,146	802	2,989	704	2,479	1,441	6,723		

Sumber : Lembaran Informasi Ketransmigrasian, Dinas Nakertrans Sumatera Barat, 2005

Tabel 2.  
Unit Peremuklman Transmigrasi yang Dibangun di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	LOKASI	PENEMPATAN			PENYERAHAN		NAMA DESA	KECAMATAN
		TAHUN	KK	JIWA	TAHUN	KK		
1	Lunang I	1973/1974	300	1.344	1980/1981	509	2.521	Lunang Silaut
2	Lunang II	1974/1975	300	1.177	1981/1982	552	2.453	Lunang Silaut
		1981/1982	500	2.119	1988/1989			
3	Lunang III	1982/1983	500	2.090	1988/1989	552	2.595	Lunang Silaut
4	Silaut I	1985/1986	200	725	1991/1992	530	2.138	Lunang Silaut
5	Silaut II	1986/1987	374	1.482	1991/1992	376	1.292	Lunang Silaut
		1986/1987	26	102	1992/1993			
6	Silaut III	1987/1988	350	1.235	1992/1993	500	2.331	Lunang Silaut
		1990/1991	300	1.168	1998/1999			
		1991/1992	200	884	1998/1999			
7	Silaut IV	1991/1992	300	1.233	1998/1999	300	1.495	Lunang Silaut
		1994/1995	162	590	1996/1997			
9	Inderapura	1994/1995	450	1.958	2002	473	2.091	Pancung Soal
		1994/1995	300	1.087	2004	302	1.356	Lunang Silaut
11	Sindang	1996/1997	250	1.294	2004	250	1.308	Lunang Silaut
12	Silaut VI	2000	69	269	2001	150	594	Lunang Silaut
		2001	200	788				
13	Kumbung	2001	150	594	20139	4.506	20.170	Lunang Silaut
		2001	4.931	20139				

Sumber: Lembaran Informasi Ketansmigrasian, Dinas Nakertrans Sumatera Barat, 2005

Kebanyakan dari mereka sebelumnya bekerja sebagai buruh tidak tetap dengan penghasilan antara Rp40.000,- sampai Rp200.000,- per bulan. Sebagian lainnya bahkan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Mereka yang mempunyai sedikit lahan telah menjualnya dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk biaya mengikuti transmigrasi. Setelah mengikuti transmigrasi, mereka mengaku memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Namun begitu, peningkatan kesejahteraan baru terjadi pada masyarakat transmigran di UPT Lunang II, Silaut II dan Silaut IV.

Belum terjadi peningkatan pendapatan transmigran di UPT Sindang dan UPT Inderapura. UPT Sindang merupakan UPT dengan pola P4HDR. Sebelum mengikuti transmigrasi, pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pengangkut kayu hasil penebangan ilegal (*illegal logging*) dengan pendapatan rata-rata per bulan berkisar antara Rp200.000,- hingga Rp400.000,-. Setelah mengikuti transmigrasi dan UPT diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2004, pendapatan mereka justru menjadi lebih kecil yaitu rata-rata hanya sebesar Rp150.000,-/ bulan. Hal yang sama juga terjadi pada UPT Inderapura. Belum adanya peningkatan kesejahteraan transmigran di UPT ini disebabkan oleh ketidakjelasan status lahan usaha yang diberikan Pemerintah kepada mereka. Lahan usaha yang mereka terima digugat sebagai milik warga setempat sehingga mereka tidak punya lahan lagi yang bisa diolah. Akibatnya, banyak di antara mereka

mencari pekerjaan di luar lokasi transmigrasi sebagai buruh.

#### Sosial Budaya

Hal yang menarik di daerah transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah banyaknya kejadian perkawinan campuran antara warga transmigran dan penduduk asli setempat. Hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan proses asimilasi dan integrasi sosial yang diharapkan dari adanya program transmigrasi. Dalam rangka mendukung terjadinya proses asimilasi dan integrasi sosial tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya agar para transmigran menjadi *anak kemenakan* dari kepala suku (*ninik mamak*) yang ada di wilayah tersebut. Tujuannya adalah agar dapat meminta pendapat kepada *ninik mamak* mereka untuk turut menyelesaikan sesuai adat yang ada di Sumatera Barat jika terjadi masalah mengenai lahan, perkawinan anak-anak mereka, kematian dan lain-lain.

#### METODE PENYUSUNAN INDEKS KEBERHASILAN TRANSMIGRASI (IKT) DENGAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Indeks Keberhasilan Transmigrasi (IKT) yang dibangun dalam penelitian ini terdiri dari indikator-indikator yang umumnya bersifat kualitatif. Indikator-indikator tersebut diharapkan mampu merepresentasikan pencapaian tujuan program transmigrasi. Dalam menentukan indikator-indikator dan rumusan IKT tersebut, penelitian ini menggunakan model *Analytic Hierarchy Process* (AHP)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Penjelasan mengenai metode AHP terdapat pada buku berjudul AHP ditulis oleh Bambang P.S. Brojonegoro (1992)

Tujuan akhir penggunaan metode AHP adalah memberikan penilaian secara kuantitatif terhadap pencapaian tujuan pembangunan transmigrasi.

Kriteria, sub-kriteria dan indikator yang menyusun IKT serta hirarki dan hasil penghitungan bobot masing-masing kriteria, sub kriteria dan indikator dengan menggunakan metode AHP ditunjukkan pada Tabel 3 dan Gambar 1.

Penentuan bobot untuk masing-masing kriteria, sub kriteria dan indikator dalam penyusunan IKT dilakukan berdasarkan penilaian ahli (*expert*). Dalam penelitian ini para *expert* dipilih berdasarkan pengalaman dan penguasaannya dalam bidang ketransmigrasian. Mereka terdiri dari 5 pejabat di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), 1 staf pelaksana lapangan di Pusdatin Ketransmigrasian Depnakertrans, serta 1 pejabat dan 1 staf lapangan Nakertrans Dinas Provinsi Sumatera Barat. Pemberian bobot pada indikator-indikator IKT dilakukan untuk melihat derajat kepentingan masing-masing indikator dalam merepresentasikan keberhasilan pembangunan transmigrasi, yang merupakan penjabaran dari kriteria tujuan dan sub-kriteria masing-masing tujuan.

Gambar 1 menunjukkan bahwa kriteria "kesejahteraan" mempunyai bobot tertinggi yaitu sebesar 0,661, diikuti oleh kriteria "pembangunan daerah" sebesar 0,208 dan kriteria "integrasi nasional" sebesar 0,131. Implikasinya adalah bahwa kebijakan yang harus dijalankan Pemerintah dalam melaksanakan program transmigrasi adalah dengan mengutamakan adanya peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di sekitar lokasi transmigrasi.

Pada kelompok kriteria "kesejahteraan", pemberian bobot tertinggi diberikan pada sub-kriteria "ekonomi" yaitu sebesar 0,614. Bobot ini jauh lebih besar dibandingkan bobot sub-kriteria "pendidikan" dan sub-kriteria "kesehatan" yang masing-masing hanya mencapai 0,268 dan 0,117. Implikasi kebijakan yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya adalah dengan meningkatkan tingkat ekonomi mereka.

Pada kelompok kriteria "pembangunan daerah", sub-kriteria "penambahan tenaga kerja" mendapatkan bobot tertinggi yaitu sebesar 0,433, jauh lebih tinggi dibandingkan sub-kriteria "peningkatan penerimaan daerah" yang hanya sebesar 0,106, "terbentuknya pusat pertumbuhan baru" sebesar 0,289 dan "peningkatan investasi" sebesar 0,172. Dari angka-angka tersebut, kebijakan yang harus diprioritaskan Pemerintah dalam pembangunan transmigrasi adalah kebijakan yang mampu menciptakan kesempatan kerja melalui kegiatan ekonomi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga akhirnya mampu mendukung pembangunan daerah.

Pada kelompok kriteria "integrasi nasional", sub-kriteria "integrasi dan asimilasi" memperoleh bobot 0,75 sedangkan sub-kriteria "keserasian dan kerukunan" mendapat bobot sebesar 0,25. Hal ini berimplikasi pada prioritas kebijakan Pemerintah yang mampu mengupayakan terjadinya integrasi dan asimilasi antara warga transmigran dan masyarakat setempat dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Penilaian ahli (*expert*) memberikan bobot tertinggi pada indikator-indikator



**Tabel 3**  
**Kriteria, Sub Kriteria dan Indikator yang Menyusun IKT**

Kriteria	Sub-kriteria	Indikator
Kesejahteraan	Ekonomi	1. Indikator Pendapatan Transmigran dan Masyarakat sekitar 2. Indikator Pemerataan Pendapatan
	Pendidikan	3. Indikator Tingkat Melek Huruf 4. Indikator Rasio <i>Primary Enrollment</i> Netto
	Kesehatan	5. Indikator Prevalensi Penyakit 6. Indikator Angka Kematian Balita 7. Indikator Rasio Kematian Ibu Melahirkan
Pembangunan Daerah	Penambahan Tenaga Kerja	8. Indikator Tenaga Kerja Langsung 9. Indikator Tenaga Kerja Tak Langsung 10. Indikator Tenaga Kerja Pendukung
	Peningkatan Penerimaan Daerah	11. Indikator Penerimaan PBB 12. Indikator Penerimaan Pajak Kendaraan
	Terbentuknya Pusat Pertumbuhan baru	13. Indikator Aksesibilitas 14. Indikator Komoditi Unggulan 15. Indikator Lembaga Ekonomi 16. Indikator Adanya Faso dan Fasum
	Peningkatan Investasi	17. Indikator Adanya Investor 18. Indikator Adanya Industri Pengolahan

**Tabel 3**  
**Kriteria, Sub Kriteria dan Indikator yang Menyusun IKT**  
 (lanjutan)

Kriteria	Sub-kriteria	Indikator
Integrasi Nasional	Integrasi dan Asimilasi	19 Indikator Perkawinan Campuran 20 Indikator Keterlibatan Trans sebagai Aparat
	Kerukunan dan Kekeragaman	21 Indikator Terjadinya Konflik akibat SARA 22 Indikator Keterlibatan Trans dalam Organisasi 23 Indikator Terbentuknya Organisasi

sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Hasil penghitungan bobot tersebut merupakan hasil dari rata-rata penilaian *expert* dengan menganggap setiap *expert* mempunyai bobot yang sama, yang dilakukan sebelum diolah dengan menggunakan Program Expert Choice.

#### Penghitungan IKT

Bobot dari masing-masing kriteria, sub-kriteria dan indikator pada Tabel 4 selanjutnya digunakan sebagai rumusan untuk menghitung IKT di suatu daerah. Dalam menghitung IKT perlu ditentukan lebih dulu rumusan intensitas indikator. Hal ini untuk menentukan nilai intensitas masing-masing indikator daerah yang akan dihitung nilai IKTnya. Ada dua rumusan yang digunakan dalam menentukan nilai intensitas indikator sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai intensitas indikator yang digunakan dalam IKT adalah antara 0 dan 1 dengan interval nilai sebesar 0,1.

#### Cara Penentuan Nilai Intensitas Indikator

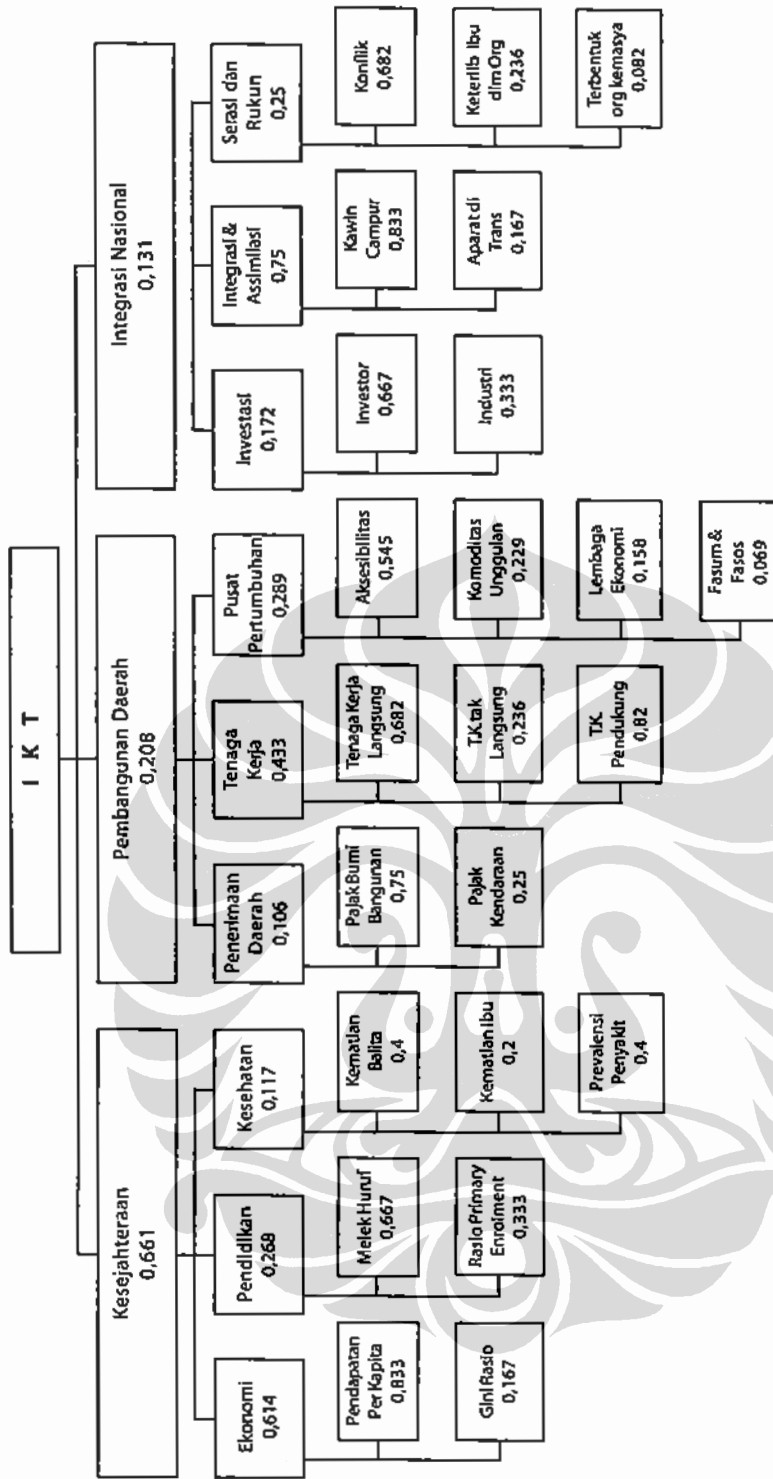
##### Penentuan Nilai Intensitas Indikator dengan Menggunakan Batas Minimum-Maksimum yang Bersifat Positif.

Rumus ini digunakan apabila kita ingin menjelaskan bahwa semakin besar nilai data dasar indikator yang akan dihitung semakin besar pula nilai intensitas indikator yang diperoleh (mendekati angka satu). Indikator yang dihitung dengan rumus ini adalah indikator "pendapatan per kapita transmigran", "angka melek huruf", "rasio *primary enrollment netto*", "tenaga kerja langsung", "tenaga kerja tak langsung", "tenaga kerja pendukung", "pajak bumi dan bangunan", "pajak kendaraan bermotor", "kawin campur" dan "keterlibatan transmigran dalam organisasi".

##### Penentuan Nilai Intensitas Indikator dengan Menggunakan Batas Minimum-Maksimum yang Bersifat Negatif.

Rumus ini digunakan apabila kita ingin menjelaskan bahwa semakin besar nilai

Gambar 1  
 Hirarki dan Hasil Penentuan Bobot pada IK T



**Tabel 4**  
**Indikator-indikator dengan Bobot Tertinggi berdasarkan Penilaian Ahli (Expert)**

No,	Nama Indikator	Sub-Kriteria	Bobot
1	Pendapatan per kapita	Ekonomi	0,833
2	Melek Huruf	Pendidikan	0,667
3	Kematian Balita	Kesehatan	0,40
4	Prevalensi Penyakit	Kesehatan	0,40
5	Pajak Bumi dan Bangunan	Penerimaan Daerah	0,75
6	Tenaga Kerja Langsung	Penambahan Tenaga Kerja	0,682
7	Aksesibilitas	Terjadinya Pusat Pertumbuhan Baru	0,545
8	Investor	Peningkatan Investasi	0,667
9	Kawin Campur	Integrasi dan Asimiliasi	0,833
10	Konflik	Keserasian dan Kerukunan	0,682

data dasar indikator yang akan dihitung akan memberikan nilai intensitas indikator yang semakin kecil (mendekati angka nol). Indikator yang dihitung dengan rumus ini adalah indikator "gini rasio", "prevalensi penyakit", "angka kematian balita", serta "angka kematian ibu hamil dan melahirkan".

**Penentuan Nilai Intensitas Indikator dengan Menggunakan Ketentuan Khusus.** Penentuan nilai intensitas dengan cara ini digunakan untuk indikator-indikator yang sulit ditentukan batas minimum dan maksimumnya sehingga penghitungannya menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah atau kondisi yang diinginkan atau yang harus dipenuhi. Indikator-indikator yang dihitung nilai intensitasnya dengan menggunakan ketentuan ini adalah indikator "aksesibilitas", "komoditas unggulan", "lembaga ekonomi", "fasilitas sosial dan fasilitas umum", "investor", "industri pengolahan

dan derivatnya", "transmigran sebagai aparat pemerintah", "konflik SARA" dan Indikator "terbentuknya organisasi kemasyarakatan".

Berdasarkan nilai intensitas indikator tersebut selanjutnya dapat dihitung nilai indeks dengan menggunakan rumus IKT yang disajikan pada Tabel 6. Skala yang digunakan untuk penilaian IKT adalah antara 0 dan 1. Selanjutnya dari interval nilai tersebut dibuat lima kategori penilaian terhadap keberhasilan pembangunan transmigrasi sebagai berikut:

1. Nilai  $0,8 < \text{IKT} \leq 1,0$  untuk kategori sangat berhasil;
2. Nilai  $0,6 < \text{IKT} \leq 0,8$  untuk kategori berhasil;
3. Nilai  $0,4 < \text{IKT} \leq 0,6$  untuk kategori cukup berhasil;
4. Nilai  $0,2 < \text{IKT} \leq 0,4$  untuk kategori kurang berhasil;
5. Nilai  $0,0 < \text{IKT} \leq 0,2$  untuk kategori tidak berhasil.

**Tabel 5.**  
**Rumusan Penentuan Nilai Intensitas Indikator dalam Penghitungan IKT**

Dengan Batas Maksimum dan Minimum	
<p><b>Bersifat Positif</b>                      X = Batas Minimum                      Y = Batas Maksimum  <math>D = (Y - X) / 9</math></p> <p>Nilai Intensitas adalah :</p> <p>0 : Data Dasar &lt; X                      0,1 : X &lt; Data Dasar &lt; (X + d)                      0,2 : (X + d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 2d)                      0,3 : (X + 2d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 3d)                      0,4 : (X + 3d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 4d)                      0,5 : (X + 4d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 5d)                      0,6 : (X + 5d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 6d)                      0,7 : (X + 6d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 7d)                      0,8 : (X + 7d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 8d)                      0,9 : (X + 8d) &lt; Data Dasar &lt; Y                      1 : Data Dasar ≥ Y</p>	<p><b>Bersifat Negatif</b>                      X = Batas Minimum                      Y = Batas Maksimum  <math>d = (Y - X) / 9</math></p> <p>Nilai Intensitas adalah :</p> <p>0 : Data Dasar &gt; Y                      0,1 : (X + 8d) &lt; Data Dasar &lt; Y                      0,2 : (X + 7d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 8d)                      0,3 : (X + 6d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 7d)                      0,4 : (X + 5d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 6d)                      0,5 : (X + 4d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 5d)                      0,6 : (X + 3d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 4d)                      0,7 : (X + 2d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 3d)                      0,8 : (X + d) &lt; Data Dasar &lt; (X + 2d)                      0,9 : X &lt; Data Dasar &lt; (X + d)                      1 : Data Dasar ≤ X</p>
Tanpa Batas Maksimum dan Minimum	
<p>Misal:                      Bersifat Positif                      Nilai Intensitas adalah :</p> <p>0 : Tidak ada                      0,5 : Ada 1                      1 : Ada lebih dari satu</p>	<p>Bersifat Negatif                      Nilai Intensitas adalah :</p> <p>0 : Ada lebih dari satu                      0,5 : Ada satu                      1 : Tidak ada</p>

Tabel 6  
Rumus Penghukungan Indeks Keberhasilan Transmigrasi (IKT)

Indikator (I)	Nilai Intensitas Indikator (NI)	Bobot Indikator (BI)	Nilai Indikator (NI)	Sub Kriteria (SK)	Bobot Sub Kriteria (BSK)	Nilai Sub Kriteria (NSK)	Kriteria (K)	Bobot Kriteria (BK)	Nilai Kriteria (NK)	Nilai Indeks (IKT)
			(NI=NB)			(2NI*BSK)			(2NSK*BK)	
I <sub>1</sub>	N <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	NI <sub>1</sub>	SK <sub>1</sub>	BSK <sub>1</sub>	NSK <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	BK <sub>1</sub>	NK <sub>1</sub>	NI <sub>1</sub> +NK <sub>1</sub> +NK <sub>5</sub>
I <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	NI <sub>2</sub>	SK <sub>1</sub>	BSK <sub>1</sub>	NSK <sub>1</sub>				
I <sub>3</sub>	N <sub>3</sub>	B <sub>3</sub>	NI <sub>3</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>4</sub>	N <sub>4</sub>	B <sub>4</sub>	NI <sub>4</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>5</sub>	N <sub>5</sub>	B <sub>5</sub>	NI <sub>5</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>6</sub>	N <sub>6</sub>	B <sub>6</sub>	NI <sub>6</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>7</sub>	N <sub>7</sub>	B <sub>7</sub>	NI <sub>7</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>8</sub>	N <sub>8</sub>	B <sub>8</sub>	NI <sub>8</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>9</sub>	N <sub>9</sub>	B <sub>9</sub>	NI <sub>9</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>10</sub>	N <sub>10</sub>	B <sub>10</sub>	NI <sub>10</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>11</sub>	N <sub>11</sub>	B <sub>11</sub>	NI <sub>11</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>	K <sub>5</sub>	BK <sub>5</sub>	NK <sub>5</sub>	
I <sub>12</sub>	N <sub>12</sub>	B <sub>12</sub>	NI <sub>12</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>13</sub>	N <sub>13</sub>	B <sub>13</sub>	NI <sub>13</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>14</sub>	N <sub>14</sub>	B <sub>14</sub>	NI <sub>14</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>15</sub>	N <sub>15</sub>	B <sub>15</sub>	NI <sub>15</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>16</sub>	N <sub>16</sub>	B <sub>16</sub>	NI <sub>16</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>17</sub>	N <sub>17</sub>	B <sub>17</sub>	NI <sub>17</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>18</sub>	N <sub>18</sub>	B <sub>18</sub>	NI <sub>18</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>19</sub>	N <sub>19</sub>	B <sub>19</sub>	NI <sub>19</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>20</sub>	N <sub>20</sub>	B <sub>20</sub>	NI <sub>20</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>21</sub>	N <sub>21</sub>	B <sub>21</sub>	NI <sub>21</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>	K <sub>5</sub>	BK <sub>5</sub>	NK <sub>5</sub>	
I <sub>22</sub>	N <sub>22</sub>	B <sub>22</sub>	NI <sub>22</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				
I <sub>23</sub>	N <sub>23</sub>	B <sub>23</sub>	NI <sub>23</sub>	SK <sub>5</sub>	BSK <sub>5</sub>	NSK <sub>5</sub>				

**HASIL PENGHITUNGAN DAN ANALISIS NILAI IKT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Gambar 2 menunjukkan hasil penghitungan IKT yang dilakukan pada UPT Silaut II, Silaut IV, Lunang II, Sindang, Inderapura, Kumbang dan Silaut VI serta hasil penghitungan IKT di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan data yang diperoleh dari survei lapangan.

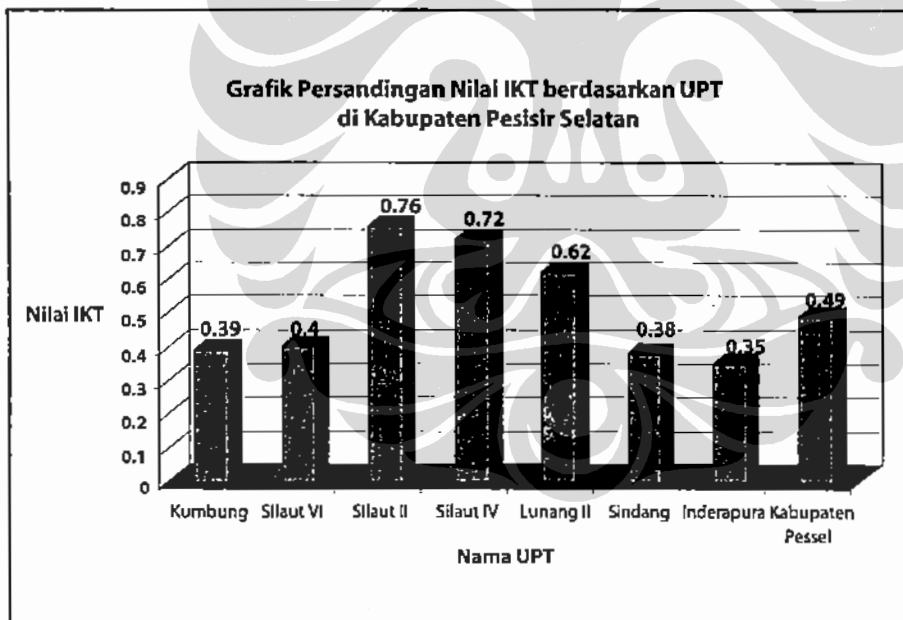
Gambar tersebut menunjukkan bahwa pembangunan transmigrasi di tujuh UPT memberikan hasil yang bervariasi. Tinggi rendahnya nilai IKT sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya nilai intensitas indikator yang dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Tabel 6 menunjukkan hasil penghitungan nilai intensitas indikator dan nilai IKT di tujuh UPT dan di Kabupaten Pesisir Selatan.

**UPT Silaut II**

UPT Silaut II mempunyai nilai IKT 0,76 dan termasuk kategori UPT yang berhasil. Dengan tingkat pendapatan per kapita transmigran mencapai Rp931.213,- dan indeks rasio gini sebesar 0,36 dapat dikatakan bahwa kesejahteraan transmigran di UPT Silaut II cukup tinggi dan merata. Di bidang pendidikan, hanya sedikit transmigran berumur di atas 15 tahun yang buta huruf. Namun demikian masih cukup banyak anak yang belum memenuhi wajib belajar 9 tahun. Rendahnya angka kematian balita, angka kematian ibu hamil dan melahirkan serta prevalensi penyakit menunjukkan bahwa tingkat kesehatan transmigran di UPT ini sangat baik.

Selain dikenal sebagai daerah penghasil salak, UPT Silaut II merupakan

Gambar 2.



lokasi penghasil sawit yang cukup diandalkan baik di tingkat Kecamatan Lunang Silaut maupun di Kabupaten Pesisir Selatan. Sayangnya, aksesibilitas transportasi ke lokasi UPT ini cukup rendah karena kondisi jalan penghubung, jalan poros dan jalan desa di lokasi tersebut sangat buruk. Hal ini tentu saja kurang mendukung kemudahan dan kelancaran pengangkutan hasil sawit dari lokasi kebun ke perusahaan penampung hasil produksi tersebut. Akibatnya, biaya angkut menjadi tinggi dan harga jual hasil kelapa sawit yang diterima petani menjadi rendah. Rendahnya harga jual tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan yang diterima oleh transmigran.

#### UPT Silaut IV

UPT Silaut IV memperoleh nilai IKT sebesar 0,72 dan dikategorikan sebagai UPT yang berhasil. Dari sisi kriteria "kesejahteraan", tingkat ekonomi transmigran di UPT ini cukup tinggi dan merata dengan tingkat pendapatan per kapita transmigran sebesar Rp674.980,- dan rasio gini mencapai 0,32. Di bidang pendidikan, tidak ada transmigran yang berusia lebih dari 15 tahun yang masih buta huruf. Namun begitu, angka rasio *primary enrollment netto* menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang tidak bersekolah. Tingkat kesehatan transmigran di UPT ini sangat baik dinilai dari rendahnya angka kematian balita, angka kematian ibu hamil dan melahirkan serta prevalensi penyakit. Keberadaan UPT ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terutama melalui penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan

nilai produksi komoditas unggulan kelapa sawit. Kendala pemasaran hasil sawit di UPT ini hampir sama dengan yang dihadapi para transmigran di UPT Silaut II yaitu aksesibilitas yang buruk.

#### UPT Lunang II

Nilai IKT di UPT Lunang II mencapai 0,62 dan termasuk ke dalam kelompok UPT yang berhasil. Dari sisi kriteria "kesejahteraan", pendapatan per kapita transmigran di UPT ini masih lebih rendah dibandingkan UPT Silaut II dan Silaut IV. Namun pencapaian di bidang pendidikan sudah cukup baik. Hanya sedikit penduduk berumur di atas 15 tahun yang buta huruf dan rasio anak-anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah berada di bawah 25 persen. Di bidang kesehatan, UPT ini dikategorikan bagus karena memiliki angka kematian balita, rasio kematian ibu hamil dan melahirkan serta prevalensi penyakit yang rendah. Pada kriteria "pembangunan daerah", keberhasilan ditunjukkan oleh tingginya (91 persen) transmigran yang sudah membayar PBB. Tidak adanya konflik yang terjadi di UPT ini berpengaruh terhadap kerukunan hidup antara warga transmigran dan penduduk setempat. Beberapa perkawinan campuran terjadi antara transmigran dan penduduk setempat. Aksesibilitas di UPT ini cukup sulit sebagaimana yang terjadi di UPT Silaut II dan Silaut IV. Kondisi infrastruktur rusak sehingga menghambat kelancaran pengangkutan dan pemasaran hasil produksi pertanian.

#### UPT Inderapura

Dengan nilai IKT sebesar 0,35, UPT Inderapura termasuk UPT yang kurang berhasil. Berbeda dengan UPT Silaut II,



Tabel 7  
 Hasil Penghitungan Nilai Intensitas Indikator pada IKT

No	Indikator	Lunang II	Silaut II	Silaut IV	Sindang	Inderapura	Kumbang IV	Silaut	Kab. Pessel
1	Pendapatan Per Kapita	0,6	1	0,8	0	0	0	0	0,2
2	Gini rasio	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,9	0,7	0,6
3	Melek Huruf	0,9	0,9	1	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9
4	Rasio Primary Enrolment	0,7	0,5	0,5	0,6	0,3	0,9	0,7	0,6
5	Kematian balita	0,9	1	1	1	1	1	0,9	0,9
6	Kematian Ibu	1	0,9	1	1	1	1	1	0,9
7	Prevalensi Penyakit	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9
8	Tenaga Kerja Langsung	0,8	0,9	0,7	0,3	0,1	1	0,7	0,6
9	Tenaga Kerja Tak Langsung	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
10	Tenaga Kerja Pendukung	0,4	0,8	0,6	0,4	0,8	0	0,4	0,8
11	Pajak Bumi dan Bangunan	0,9	0,9	0,9	0,5	0,3	0	0	0,6
12	Pajak Kendaraan Bermotor	0,3	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
13	Aksesibilitas	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
14	Komoditas Unggulan	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5
15	Lembaga Ekonomi	0,4	0,6	0,6	0,4	0,6	0,2	0,2	0,6
16	Fasos dan Fasum	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,4	0,6	0,7
17	Investor	0	0	0	0	0	0	0	0,5
18	Industri Pengolahan	0,4	0,4	0	0	0,2	0	0,2	0,6
19	Perkawinan Campur	0,3	0,3	0,6	0,4	0,5	0	0,5	0,4
20	Transmigran sebagai Aparat	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4
21	Konflik	0,8	1	1	1	0,9	1	1	0,8
22	Keterlibatan Trans. dalam Org.	0,9	0,9	0,9	1	0,5	1	1	0,9
23	Terbentuknya Organisasi	1	0,8	0,8	0,6	0,6	0,4	0,6	1
<b>Nilai IKT</b>		<b>0,62</b>	<b>0,76</b>	<b>0,72</b>	<b>0,38</b>	<b>0,35</b>	<b>0,39</b>	<b>0,40</b>	<b>0,49</b>

Silaut IV dan Lunang II yang berhasil mengembangkan komoditas kelapa sawit menjadi komoditas unggulan, UPT Inderapura menghadapi kondisi sebaliknya. Jangankan menanam sawit, lahan usaha I dan lahan usaha II yang seharusnya menjadi hak transmigran telah diaku sebagai hak milik penduduk setempat dan tidak boleh diolah. Akibatnya, warga transmigran di UPT ini tidak dapat bertani dan bekerja sebagai buruh di luar UPT. Kondisi ini menjadikan kehidupan mereka menjadi sangat memprihatinkan.

Dilihat dari sisi kriteria kesejahteraan, pendapatan per kapita transmigran di UPT Inderapura sangat rendah yaitu hanya sebesar Rp298.098,-, masih di bawah batas minimum yang digunakan IKT. Di bidang pendidikan, jumlah penduduk berumur di atas 15 tahun yang buta huruf cukup rendah yaitu hanya 5 persen. Namun begitu, angka rasio *primary enrollment netto* cukup rendah yaitu 29 persen. Ini berarti jumlah anak usia sekolah SD dan SMP yang tidak bersekolah mencapai 71 persen. Secara keseluruhan, kurangberhasilan pembangunan transmigrasi di UPT Inderapura merupakan dampak dari adanya pengakuan kepemilikan lahan oleh penduduk setempat yang menyebabkan transmigran tidak bisa mengolah lahan.

#### UPT Sindang

UPT Sindang merupakan program transmigrasi yang menggunakan pola Peningkatan Program Pemukiman Perambah Hutan Melalui Dana Reboisasi (P4HDR). Seluruh transmigran yang ditempatkan di lokasi ini adalah penduduk setempat (TPS) yang rata-rata sebelumnya bekerja sebagai pengangkut kayu pada kegiatan *illegal logging*.

Ada perbedaan mendasar antara transmigran dari daerah asal (TPA) yang berasal dari Pulau Jawa dan transmigran yang berasal dari penduduk setempat (TPS) dalam hal daya juang dan keuletan mereka dalam mengelola lahan yang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi transmigrasi yang transmigrannya merupakan TPA lebih berhasil dibandingkan lokasi yang transmigrannya merupakan TPS. Meskipun memiliki status sebagai UPT Serah sejak tahun 2004, rata-rata pendapatan transmigran di UPT Sindang ternyata lebih rendah dibandingkan pendapatan mereka sebelum bertransmigrasi. Kemudahan mereka dalam mendapatkan pendapatan selama bekerja pada *illegal logging* belum bisa mengubah kesadaran mereka untuk menjadi petani pengolah tanah. Akibatnya pendapatan mereka tidak meningkat.

Kondisi lokasi transmigrasi mereka juga belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Salah satunya ditunjukkan oleh buruknya kondisi jalan menuju lokasi transmigran dan juga kondisi jalan di dalam lokasi transmigran. Saat hujan turun, jalan-jalan tersebut sama sekali tidak bisa dilewati. Dengan kondisi seperti tersebut, nilai IKT UPT Sindang hanya mencapai 0,38 dan termasuk ke dalam kategori kurang berhasil.

#### UPT Kumbang

UPT Kumbang adalah UPT yang masih dibina oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai UPT yang masih dalam pembinaan, belum banyak hasil pembangunan yang telah dicapai. Nilai IKT UPT Kumbang hanya sebesar 0,39 dan masuk ke dalam kategori kurang berhasil. Rendah-

nya nilai IKT ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah masih belum adanya kontribusi dari sektor pajak terutama PBB karena lahan dan bangunan yang berada di UPT yang masih dibangun belum dikenai PBB. Selain itu, proses pengolahan lahan masih dalam status penyesuaian sehingga belum memberikan hasil produksi yang mampu menyumbang pada output daerah. Situasi di UPT ini diperburuk oleh rendahnya aksesibilitas yang ditunjukkan oleh kondisi jalan yang rusak parah.

#### **UPT Silaut VI**

Seperti halnya UPT Kumbang, UPT Silaut VI masih berstatus UPT pembinaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Penyesuaian yang dilakukan transmigran dalam pengolahan lahannya ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap output dan pembangunan daerah. Dari kriteria kesejahteraan, pendapatan per kapita transmigran masih di bawah batas minimum yang ditetapkan IKT. Sementara itu, belum ada kontribusi dari sektor pajak. Aksesibilitas sangat rendah karena kondisi infrastruktur jalan yang ada di lokasi ini rusak sehingga kurang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi transmigran. UPT ini masuk dalam kategori kurang berhasil karena IKT yang dicapai oleh UPT Silaut VI hanya sebesar 0,40.

#### **Kabupaten Pesisir Selatan**

Nilai IKT yang diperoleh Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 0,49. Angka ini diperoleh berdasarkan data yang ada pada seluruh UPT yang diteliti. Dengan nilai ini, program transmigrasi di Kabu-

paten Pesisir Selatan masuk ke dalam kategori cukup berhasil. Pendapatan per kapita rata-rata transmigran sudah di atas batas minimum IKT namun tidak didukung oleh tingkat pemerataan pendapatan yang tinggi. Walau hanya sedikit transmigran berusia di atas 15 tahun yang buta huruf, namun masih banyak anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah.

Tingkat kesehatan transmigran di Kabupaten ini cukup bagus dilihat dari tingginya nilai intensitas untuk indikator indikator angka kematian balita, rasio kematian ibu hamil dan melahirkan serta prevalensi penyakit. Dari kriteria pembangunan daerah, kontribusi yang diberikan oleh sub sektor penambahan tenaga kerja, penerimaan daerah melalui pajak, investasi dan terjadinya pusat pertumbuhan baru memberikan nilai intensitas yang cukup.

Masuknya investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan pengolah sawit dan adanya komoditas unggulan memberikan kontribusi pada keberhasilan pembangunan transmigrasi di Kabupaten ini. Namun masih adanya konflik UPT di Kabupaten ini mengurangi tingkat keberhasilan tersebut. Meskipun secara keseluruhan tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlalu tinggi diukur dari nilai IKTnya yang hanya sebesar 0,49, keberadaan transmigrasi di daerah ini ternyata sangat memberikan arti bagi masyarakat di Kabupaten tersebut khususnya di Kecamatan Lunang Silaut. Keberadaan Kecamatan Lunang Silaut yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pancung tidak lepas dari peran keberadaan lokasi transmigrasi.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Penyusunan IKT dengan menggunakan metode AHP untuk mengukur keberhasilan program transmigrasi dan penerapannya di Kabupaten Pesisir Selatan memberikan hasil sebagai berikut:

- a. Penggunaan metode AHP mampu menghasilkan suatu ukuran keberhasilan yaitu IKT yang dapat memberikan gambaran mengenai pembangunan transmigrasi di sejumlah UPT yang diamati, baik di UPT Binaan maupun UPT Pasca Binaan (UPT Serah). Metode AHP yang digunakan dalam membangun IKT ternyata mampu memberikan hasil yang cukup baik dilihat dari kemampuannya merepresentasikan kondisi keberhasilan transmigrasi sebagaimana kondisi sesungguhnya di lapangan. Hal ini bisa dilihat dari hasil penghitungan IKT di masing-masing UPT. Data-data di lapangan yang berhasil ditangkap melalui indikator-indikator yang membangun IKT dan proses penghitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumusan IKT mampu merepresentasikan tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi secara menyeluruh, baik dalam lingkup UPT maupun dalam lingkup kabupaten.
- b. Dari tujuh UPT yang diteliti, hanya tiga diantaranya dinyatakan berhasil dengan nilai IKT di atas 0,6 yaitu UPT Lunang II, UPT Silaut II dan UPT Silaut IV. Empat UPT lainnya yaitu UPT Inderapura, UPT Sindang, UPT Silaut VI dan UPT Kumbang dinilai kurang berhasil. Keberhasilan pembangunan

transmigrasi di sejumlah UPT di Kabupaten Pesisir Selatan ini terutama didukung oleh keberhasilan para transmigran mengembangkan komoditas pertanian unggulan. Namun, rendahnya aksesibilitas transportasi ke lokasi transmigran menjadi faktor penghambat dalam upaya peningkatan harga jual produksi. Sementara itu, kurangberhasilan keempat UPT tersebut terutama disebabkan oleh adanya konflik masalah lahan dengan penduduk asal dan keengganan transmigran penduduk setempat untuk mengolah lahannya akibat rendahnya penghasilan yang diterima dibandingkan yang mereka terima sebelum menjadi transmigran.

- c. Secara keseluruhan di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, pembangunan transmigrasi dinilai cukup berhasil dengan nilai IKT 0,49. Pencapaian ini terutama disumbang oleh tingginya nilai yang diperoleh dari kriteria kesejahteraan terutama dari sub kriteria kesehatan dan pendidikan. Disamping itu masuknya investor yang bergerak dalam bidang pengolahan kelapa sawit untuk menampung hasil produksi pertanian kelapa sawit dari lokasi-lokasi transmigrasi di Kabupaten ini, memberikan kontribusi besar terhadap tingginya nilai IKT. Adanya keserasian dan kerukunan antara transmigran dan penduduk setempat (kecuali di Inderapura) memberi penilaian yang cukup tinggi pada kriteria integrasi nasional.

### Rekomendasi

Dengan berkembangnya sejumlah komoditas pertanian menjadi komoditas

unggulan di sejumlah UPT dan cukup besarnya kontribusi komoditas pertanian tersebut terhadap output daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu memperhatikan peningkatan aksesibilitas pemasaran dan infor-

masi pasar produksi melalui perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan infrastruktur penunjang lain. Upaya ini perlu agar masyarakat di lokasi eks UPT baik eks transmigran maupun warga sekitar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anonim (2005), "Lembaran Informasi Ketransmigrasian", Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Bappenas (2001), "Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah (Regional Development Index)", Laporan Akhir Studi, Universitas Indonesia.

BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2004), *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka*, Kantor Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.

BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2004), *Kecamatan Lunang Silaut Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.

Brojonegoro, Bambang P.S. (1992), *AHP*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UI, Jakarta.

KPPOD (2004), *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha*, KPPOD Jakarta.

Saleh, Harry Heriawan (2005), *Transmigrasi: Antara Kebutuhan Masyarakat dan Kepentingan Pemerintah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Yudohusodo, Siswono (2003), *Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*, Edisi Revisi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.

